PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, SISTEM PENGENDALIAN INTERN, DAN SISTEM KEUANGAN DAERAH AKUNTANSI TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DI KABUPATEN BOMBANA

Oleh
Muhammad Syahrir¹

H. Hasbuddin²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

Erwin Hadisantoso²
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural dan pejabat fungsional di Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bombana. Total responden sebanyak 61 orang. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (2) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, (3) sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta (4) budaya organisasi, sistem pengendalian intern, sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Keterbatasan Penelitian tidak memuat kecamatan dan desa sebagai subjek dalam penelitian. Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan untuk meningkatkan budaya organisasi secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan kinerja karyawan dalam bertingkah laku guna meningkatkan pencapaian kinerja Kabupaten Bombana.

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

ABSTRACT

The aims of this study is to determine the effect of organizational culture, internal control system, and local financial accounting system on performance accountability of government agencies in Bombana regency. Respondents of the study were all structural officials, and functional officials in each regional work unit of Bombana Regency. Total of respondents were 61 persons. Data was analyzed by multiple linear regression.

The result of this research shows that organizational culture effect insignificant on performance accountability of government agencies, internal control system had significant effect on performance accountability of government agencies, local financial accounting system had significant effect on performance accountability of government agencies. Organizational culture, internal control system, local financial had significant effect on performance accountability of government agencies. Limitations The study did not include subdistricts and villages as subjects in the study. The Bombana Regency Government is expected to improve the organizational culture on a regular basis by holding educational activities, training and training and education and training related to employee performance in order to improve the achievement of Bombana Regency performance and further research.

Keywords : *Organizational Culture, Internal Control System, Local Financial Accounting System, Performance Accountability of Government Agencies*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor publik ditandai dengan semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan penyelenggaraan akuntabilitas kinerja sektor publik. Tuntutan akuntabilitas kinerja sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik (Mardiasmo, 2018). Dengan menguatnya tuntutan tersebut mendorong pemerintah pusat untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja sektor publik. Salah satu bentuk akuntabilitas adalah dengan pengukuran kinerja. Pengukuran ini bertujuan untuk menilai seberapa baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari *vertical accountability* dan *horizontal accountability*. Pengukuran kinerja menunjukkan seberapa besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan kinerja lainnya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas. Penilaian laporan akuntabilitas dinilai dari lima indikator yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Oleh karena pentingnya laporan akuntabilitas kinerja tersebut diharapkan pemerintah daerah khususnya Kabupaten Bombana dapat meningkatkan nilai dan kualitas laporan akuntabilitas kinerja.

Hasil penilaian LAKIP Kabupaten Bombana pada tahun 2012 dan 2013 memperoleh predikat D dengan nilai masing-masing sebesar 23,86 dan 23,41. Hal ini disebabkan oleh sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk manajemen kinerja, perlu banyak perbaikan, dan sebagian perubahan yang sangat mendasar. Pada tahun 2014, tidak memiliki nilai karena adanya keterlambatan dalam penyusunan LAKIP sehingga tidak dapat dilakukan penilaian. Pada tahun 2015, 2016 dan 2017 hasil penilaian LAKIP Kabupaten Bombana memperoleh predikat C dengan nilai masing-masing sebesar 30,09, 32,90, 41,99. Hal ini disebabkan oleh pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di pemerintah Kabupaten Bombana masih kurang berjalan dan memerlukan perbaikan yang lebih mendasar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa laporan akuntabilitas kinerja Kabupaten Bombana masih kurang baik atau belum optimal.

Salah satu keberhasilan penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tidak terlepas dari pengaruh faktor internal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor yang berasal dari dalam organisasi, salah satunya adalah budaya organisasi. Budaya organisasi berdampak pada kinerja organisasi, bahkan mungkin merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Budaya organisasi masih menjadi sorotan di pemerintah daerah Kabupaten Bombana. Hal ini dibuktikan dengan belum optimalnya penerapan manajemen kinerja pada sejumlah SKPD, sehingga dalam pencapaian kinerja SKPD mengalami sejumlah kendala dan dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Kabupaten Bombana. Seperti yang dikemukakan Effendi (2005) yang menyatakan salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi.

Untuk mencapai kinerja yang berakuntabilitas, pemerintah daerah menerapkan sistem pengendalian intern. Pengendalian intern pada pemerintah pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat menjadi alat untuk antisipasi dan deteksi dini (*built in control*) terhadap ketidaksesuaian atau celah pelanggaran yang mungkin timbul dalam organisasi. Ketika *internal control* sistem yang dijabarkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan

birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “*under control*”. Namun, sistem pengendalian intern di pemerintah daerah Kabupaten Bombana masih lemah. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan sejumlah program dan kegiatan yang bersumber dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) umumnya tidak langsung disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga menghambat pencapaian target waktu pelaksanaan program kegiatan.

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah juga merupakan prioritas utama untuk menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu juga ditunjang oleh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Pada pemerintah daerah Kabupaten Bombana, sistem akuntansi keuangan daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya kesediaan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan penyediaan data kinerja, yaitu data dan informasi yang valid untuk pengukuran kinerja, sehingga Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan, monitoring dan evaluasi dan penyajian pelaporan kinerja dapat lebih terukur dan valid. Berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bombana masih belum optimal. Hal ini tentu menimbulkan dampak negatif kepercayaan publik terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bombana. Oleh karena itu, pemerintah daerah seharusnya dapat menjadikan hasil laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah tersebut sebagai pembelajaran atas kinerja yang menjadi tanggung jawab dalam proses akuntabilitas. Sehingga nantinya ini akan menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya, tentunya dalam penerapan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana.

Penelitian ini merupakan rujukan dari beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang akuntabilitas kinerja. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel budaya organisasi dan sistem akuntansi keuangan daerah yang merupakan saran dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2015). Selain itu, Hidayatullah (2015) dalam penelitiannya menyarankan juga untuk menambahkan variabel penerapan akuntabilitas keuangan pada penelitian selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terdapat inkonsistensi hasil penelitian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2015) disebutkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nurviasari (2016) dan Heptariani (2012), menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Kaltsum (2013), Sari (2015), dan Afrina (2015) disebutkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) menunjukkan bahwa pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berbagai fenomena dan kesenjangan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bombana”.

KERANGKA KONSEP DAN HIPOTESIS

Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Budaya organisasi adalah filosofi dasar organisasi yang membuat keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai bersama yang menjadi karakteristik inti tentang bagaimana cara melakukan sesuatu dalam organisasi. Keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai tersebut menjadi pegangan semua sumberdaya manusia dalam organisasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Ketika budaya organisasi terbentuk dan dijalankan dengan baik, sesuai tujuan organisasi, maka pencapaian kinerja akan menjadi lebih baik dan diwujudkan melalui akuntabilitas kinerja yang baik.

Penelitian Heptariani (2012) dan Nurviasari (2016) menemukan bahwa Budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan Damayanti (2015) menemukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah :

H1: Diduga budaya Organisasi Berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bombana.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, menyatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai agar tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian penyelenggaraan pemerintah Negara/Daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian intern mempunyai pengaruh dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya pengendalian yang bersifat terus menerus atas kegiatan yang berada dibawah pengawasan pimpinan (intern) maka, akan terciptanya tujuan organisasi yang semestinya, efektif dan efisien serta berpotensi dalam mengarahkan sebuah instansi pada pencapaian kinerja yang optimal atas pengendalian yang dilakukan, sehingga pertanggung jawaban kinerja yang menggambarkan pencapaian sasaran juga akan mengalami peningkatan.

Penelitian Kaltsum (2013), Sari (2015), dan Afrina (2015) menemukan bahwa Sistem Pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan Dewi (2017) menemukan bahwa Sistem Pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah :

H2: Diduga Sistem Pengendalian intern Berpengaruh signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bombana.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Permendagri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan “Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer.” Jadi ada keterkaitan antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah karena dengan adanya suatu rangkaian prosedur yang sistematis dalam rangka mempertanggungjawabkan APBD maka akan

sangat berpengaruh dalam mewujudkan tingkat pencapaian kinerja/pertanggungjawaban kinerja atas kegiatan yang telah tersusun didalam perencanaan strategis suatu instansi.

Penelitian Afrina (2015) menemukan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anwar (2017) menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah :

H3: Diduga Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bombana.

Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Simultan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Budaya organisasi merupakan faktor penting dalam mempertimbangkan keberhasilan dan kegagalan organisasi. budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi kearah perkembangan yang lebih baik. Sehingga budaya organisasi dapat mempengaruhi cara karyawan dalam bertindak laku, cara menggambarkan pekerjaan, dan cara bekerja dengan karyawan lain. Dalam setiap organisasi, budaya organisasi selalu diharapkan baik karena baiknya budaya organisasi akan berhubungan dengan berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuannya. Budaya organisasi sangat penting didalam penerapan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja instansi harus didukung dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang sistematis. Jika rangkaian prosedur akuntansi tersistematis maka akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan tingkat pencapaian kinerja/pertanggungjawaban kinerja. Hal ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Nurviasari (2016) dan Heptariani (2012), menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis dari penelitian ini adalah :

H4: Diduga Budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi pemerintah daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Bombana.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat struktural yaitu sekretaris dinas dan kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan pejabat fungsional yaitu bendahara pengeluaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bombana. Total populasi sebanyak 66 responden.

Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode sampling jenuh. Dalam penelitian ini, karena jumlah populasi terbatas sehingga peneliti mengambil jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yaitu seluruh pejabat struktural yaitu sekretaris dinas dan kepala sub bagian perencanaan dan pelaporan; dan pejabat fungsional yaitu bendahara pengeluaran di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bombana. Total sampel sebanyak 66 responden.

Pengukuran Variabel

Budaya Organisasi

Variabel budaya organisasi dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Wallach (1983), yaitu budaya birokrasi, budaya inovatif, dan budaya suportif. Setiap responden diminta tanggapannya terhadap 9 (sembilan) butir pernyataan melalui 3 (tiga) indikator tersebut untuk mengukur tingkat budaya organisasi dalam bekerja, pengaruh yang dirasakan serta kontribusi responden dalam proses bekerja. Tanggapan diberikan dengan cara memberi skala dengan rentang antara 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Tanggapan pernyataan disusun dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Sistem Pengendalian Intern

Variabel penerapan sistem pengendalian intern dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator menurut PP No. 60 Tahun 2008 yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Setiap responden diminta menjawab 22 (dua puluh dua) butir pernyataan melalui 5 (lima) indikator tersebut untuk mengukur penerapan sistem pengendalian intern dalam bekerja dan pengaruh yang dirasakan serta kontribusi responden dalam proses bekerja. Tanggapan diberikan dengan cara memberi skala dengan rentang antara 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Tanggapan pernyataan disusun dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Variabel sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator menurut Pemendagri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan. Setiap responden diminta tanggapannya terhadap 7 (tujuh) butir pernyataan melalui 3 (tiga) indikator tersebut untuk mengukur tingkat sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyelesaikan pekerjaan bekerja dan kontribusi responden dalam proses bekerja. Tanggapan diberikan dengan cara memberi skala dengan rentang antara 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Tanggapan pernyataan disusun dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 12 Tahun 2015, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan capaian kinerja. Setiap responden diminta tanggapannya terhadap 27 (dua puluh tujuh) butir pernyataan melalui 5 (lima) indikator tersebut untuk mengukur tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Tanggapan diberikan dengan cara memberi skala dengan rentang antara 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Tanggapan pernyataan disusun dengan menggunakan skala likert 1 sampai 5.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer. Data ini diperoleh dengan memberikan daftar pernyataan (kuisisioner) kepada sampel yang menjadi responden penelitian ini.

2. Data Sekunder. Data ini diperoleh melalui dokumen organisasi meliputi profil organisasi, struktur organisasi dan studi dokumentasi yang diperoleh dari buku, jurnal, dan internet.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

1. Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan sejumlah daftar pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data awal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Deskriptif Variabel Penelitian

Budaya Organisasi

Hasil instrumen yang disajikan pada tabel 2 pada lampiran menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel budaya organisasi menurut tanggapan responden tergolong sudah sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,26 dengan persentase 85,17% dari kriteria yang ditetapkan. Persepsi responden terhadap budaya organisasi menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa setiap wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada pegawai berdasarkan level hirarki secara berjenjang. Responden juga menyatakan setuju bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan selalu teratur dan sistematis, serta berlandaskan kekuasaan dan pengawasan. Pernyataan ini didukung dengan tanggapan responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju pimpinan SKPD sangat mendorong keterlibatan pegawai dalam kegiatan instansi. Responden memberikan tanggapan setuju bahwa tugas yang diberikan kepada pegawai memiliki risiko yang tinggi sehingga memerlukan kreativitas untuk menyelesaikannya dan seluruh pegawai diberikan tekanan dan stimuli untuk berkarya sekreatif mungkin. Selain itu, sebagian responden menyatakan setuju bahwa lingkungan instansi tempat mereka bekerja merupakan lingkungan yang penuh rasa kekeluargaan.

Sistem Pengendalian Intern

Hasil instrumen yang disajikan pada tabel 3 pada lampiran menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel sistem pengendalian intern menurut tanggapan responden sudah sangat baik dengan nilai rata-rata sebesar 4,19 dengan persentase 83,87% dari kriteria yang ditetapkan. Persepsi responden terhadap variabel sistem pengendalian intern menunjukkan bahwa responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pimpinan SKPD selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai. Responden juga memberikan tanggapan sangat setuju dan setuju bahwa pimpinan SKPD telah memberikan wewenang kepada pegawai yang tepat sesuai dengan tingkat tanggungjawabnya. Responden menyatakan setuju bahwa pimpinan SKPD secara terus menerus melakukan penilaian terhadap kualitas pengendalian intern. Responden menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa pengguna anggaran/pemegang kas pada masing-masing SKPD telah menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tepat pada waktunya. Responden juga menyatakan sangat setuju dan setuju bahwa saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan.

Responden juga memberikan tanggapan sangat setuju dan setuju bahwa sebagai tindak lanjut dari penilaian terhadap kualitas pengendalian intern, SKPD telah melakukan perbaikan pengendalian intern, dan pimpinan SKPD selalu mereviu dan mengevaluasi temuan yang menunjukkan adanya kelemahan dan perlu perbaikan.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Hasil instrumen yang disajikan pada tabel 4 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel sistem akuntansi keuangan daerah menurut tanggapan responden sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 4,10 dengan persentase 81,97% dari kriteria yang ditetapkan. Persepsi responden terhadap sistem akuntansi keuangan daerah menunjukkan bahwa responden menyatakan setuju bahwa mereka mampu melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry* dengan bantuan computer serta pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah dilakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis*. Selain itu, sebagian besar responden menyatakan setuju bahwa mereka memahami dan mampu melakukan penjurnalan, serta memahami cara memposting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Responden juga memberikan tanggapan setuju bahwa mereka telah memahami dan mampu menyusun laporan keuangan dan laporan keuangan yang disusun digunakan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh instansi tempat mereka bekerja selama satu periode pelaporan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil instrumen yang disajikan pada tabel 5 menunjukkan bahwa nilai rata-rata variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menurut tanggapan responden sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari nilai rata-rata sebesar 4,19 dengan persentase 83,72% dari kriteria yang ditetapkan. Persepsi responden terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan bahwa responden menyatakan setuju bahwa dokumen renstra yang digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen rencana kinerja tahunan, target jangka menengah dalam renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, dan dokumen renstra telah direviu secara berkala. Responden juga memberikan tanggapan setuju bahwa indikator kinerja utama (IKU) telah dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran, indikator kinerja utama (IKU) telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*, dan Indikator kinerja utama (IKU) telah direviu secara berkala, dan pengukuran kinerja atas rencana aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala. Responden menyatakan sangat setuju dan setuju informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, indikator kinerja utama telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja, informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, dan informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja.

Hasil Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan tabel 6 pada lampiran menunjukkan bahwa hasil uji validitas semua variabel yang terdiri atas 65 (enam puluh lima) butir pernyataan adalah valid, dimana

nilai r hitung > nilai r tabel dan memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa semua butir pernyataan dalam penelitian ini layak digunakan

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* atas variabel budaya organisasi sebesar 0,763, variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,936, variabel penerapan akuntabilitas keuangan sebesar 0,853, variabel sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,925 dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0,955. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuisioner ini reliabel karena mempunyai nilai *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60.

Analisis Faktor

Hasil uji analisis faktor untuk seluruh indikator variabel sangat signifikan mendeskripsikan setiap variabel dengan nilai signifikansi dibawah 0,05 yang berarti bahwa keseluruhan indikator variabel sangat berarti terhadap masing-masing variabel dalam penelitian ini. Jika dilihat dari uji KMO-MSA diperoleh nilai diatas 0,05 artinya proses analisis keseluruhan indikator variabel terhadap masing-masing variabel dapat dilanjutkan.

Berdasarkan tabel 7, adapun faktor yang paling dominan mendeskripsikan variabel budaya organisasi adalah budaya birokrasi dengan nilai sebesar 0,680, selanjutnya disusul budaya inovatif dan suportif dengan nilai masing-masing sebesar 0,632 dan 0,369. Sedangkan berdasarkan nilai mean, indikator yang paling dominan adalah budaya birokrasi dengan nilai 4,37 dan indikator budaya inovatif dan suportif nilai meannya hanya sebesar 4,19 dan 4,21. Artinya bahwa yang seharusnya menjadi perhatian bagi pejabat di lingkup Kabupaten Bombana telah dilakukan dengan baik yaitu indikator budaya birokrasi.

Faktor yang paling dominan mendeskripsikan variabel sistem pengendalian intern adalah penilaian risiko kemudian disusul indikator pemantauan, informasi dan komunikasi, dan lingkungan pengendalian dengan nilai masing-masing sebesar 0,718, 0,706, dan 0,671, sedangkan berdasarkan nilai mean, indikator yang paling dominan adalah lingkungan pengendalian dengan nilai 4,24, disusul oleh indikator kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, penilaian risiko, dan pemantuan dengan nilai masing-masing sebesar 4,24, 4,14, dan 2,59. Artinya bahwa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pada OPD Kabupaten Bombana adalah meningkatkan penilaian risiko namun pengelola keuangan menganggap bahwa lingkungan pengendalian merupakan hal terpenting dalam hal sistem pengendalian intern.

Faktor yang paling dominan mendeskripsikan variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah pencatatan dengan nilai sebesar 0,825, selanjutnya disusul indikator Penggolongan dan Pengikhtisaran dan pelaporan dengan nilai sebesar 0,78 dan 0,75. Sedangkan berdasarkan nilai mean indikator yang paling dominan adalah pencatatan dengan nilai 4,18, disusul oleh indikator pelaporan dan penggolongan dengan nilai sebesar 4,10 dan 3,95. Artinya bahwa yang seharusnya menjadi perhatian bagi pejabat di lingkup Kabupaten Bombana telah dilakukan dengan baik yaitu indikator pencatatan.

Faktor yang paling dominan mendeskripsikan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah indikator pelaporan dengan nilai sebesar 0,771, selanjutnya disusul indikator evaluasi internal, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan capaian kinerja dengan nilai masing-masing sebesar 0,720, 0,698, 0,688, dan 0,648. Sedangkan berdasarkan nilai mean indikator yang paling dominan adalah indikator evaluasi internal,

disusul oleh indikator perencanaan kinerja, pelaporan kinerja, capaian kinerja, dan pengukuran kinerja dengan nilai masing-masing sebesar 4,28, 4,24, 4,18, 4,16, dan 4,04. Artinya bahwa yang seharusnya dilakukan oleh pejabat pada OPD Kabupaten Bombana adalah meningkatkan indikator pelaporan namun pengelola keuangan menganggap bahwa indikator evaluasi internal merupakan hal terpenting dalam hal akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 8 diperoleh nilai koefisien regresi masing-masing variabel, sehingga dapat dibuat suatu persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 40,747 + 0,156X_1 + 0,427X_2 + 0,933 X_3 + e$$

Sehingga hasil regresi linear berganda dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Persamaan regresi linear berganda diatas menunjukkan bahwa nilai konstanta (α) sebesar 40,747. Hal ini berarti bahwa jika variabel bebas yaitu budaya organisasi (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan sistem akuntansi keuangan daerah (X_3) memiliki nilai sama dengan nol, maka perubahan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Y) akan konstan sebesar 40,747 satuan.
2. Koefisien regresi untuk variabel budaya organisasi adalah sebesar 0,156. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi (BO) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel budaya organisasi (BO) terjadi kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) akan mengalami kenaikan sebesar 0,156 satuan.
3. Koefisien regresi untuk variabel sistem pengendalian intern adalah sebesar 0,427. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara sistem pengendalian intern (SPI) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel sistem pengendalian intern (SPI) terjadi kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) akan mengalami peningkatan sebesar 0,427 satuan.
4. Koefisien regresi untuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah sebesar 0,933. Hal ini berarti bahwa terdapat hubungan yang positif antara sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP), sehingga dapat diartikan bahwa apabila variabel sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terjadi kenaikan 1 satuan dan variabel lainnya diasumsikan konstan, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) akan mengalami peningkatan sebesar 0,933 satuan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi tabel 9 pada lampiran diketahui bahwa nilai R^2 adalah 0,402 atau 40,2%. Ini berarti bahwa 40,2% variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat dijelaskan oleh variabel budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan

daerah. Sedangkan sisanya sebesar 59,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

Hasil Uji Secara Parsial (Uji T)

Hasil pengujian pengaruh X_1 (Budaya Organisasi), X_2 (Sistem Pengendalian Intern), dan X_3 (Sistem Akuntansi Keuangan Daerah) terhadap X_4 (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah sebagai berikut:

1. Budaya Organisasi (X_1)

Hasil pengujian hipotesis 1 variabel budaya organisasi yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $0,303 < t_{\text{tabel}} 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,763 > 0,05$ serta koefisien korelasi memiliki arah positif sebesar 0.156 adalah berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian maka hipotesis 1 ditolak.

2. Sistem Pengendalian Intern (X_2)

Hasil pengujian hipotesis 2 sistem pengendalian intern yang menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,200 > t_{\text{tabel}} 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,032 < 0,05$ serta koefisien korelasi memiliki arah positif sebesar 0.427 adalah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian maka hipotesis 2 diterima.

3. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X_3)

Hasil pengujian hipotesis 3 sistem akuntansi keuangan daerah yang menunjukkan nilai t hitung sebesar $2,402 > t_{\text{tabel}} 2,00247$ dan memiliki nilai signifikansi sebesar $0,020 < 0,05$ serta koefisien korelasi memiliki arah positif sebesar 0.933 adalah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian maka hipotesis 3 diterima.

4. Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Secara Simultan Berpengaruh Signifikan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (X_4)

Hasil uji simultan terlihat bahwa $F_{\text{hitung}} = 12,760 > F_{\text{tabel}} = 2,77$ dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti bahwa budaya organisasi (X_1), sistem pengendalian intern (X_2), dan sistem akuntansi keuangan daerah (X_3) secara simultan atau bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana.

Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana

Hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) menunjukkan bahwa budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan persepsi responden mengenai budaya organisasi sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana memiliki keyakinan dan mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan oleh instansinya dalam melaksanakan pekerjaannya. Indikator yang paling dominan membentuk variabel budaya organisasi

adalah budaya birokrasi. Artinya pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana memiliki kultur yang berorientasi pada kekuasaan, mapan, dan terstruktur.

Ketidaksignifikasian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa budaya organisasi kurang berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Hal ini disebabkan oleh persepsi responden berbeda-beda dalam menanggapi pernyataan-pernyataan dalam kuisioner budaya organisasi. Selain itu, sebagian besar pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana cenderung berorientasi pada tipe budaya birokrasi, yang berarti bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana selalu teratur dan sistematis hanya berlandaskan kekuasaan saja. Hal ini menyebabkan pegawai akan merasa tertekan dan takut apabila tidak bisa menyelesaikan pekerjaan dengan baik serta tugas yang diberikan kepada pegawai selalu memiliki risiko yang tinggi sehingga akan memerlukan kreativitas untuk menyelesaikannya. Kemudian masih banyak pegawai dilingkungan organisasi pemerintah daerah hanya datang mengabsen lalu mereka pulang tanpa memberikan kontribusi dilingkungan kerjanya dan kurangnya perhatian dalam mengikuti pelatihan-pelatihan sehingga penerapan dalam lingkungan organisasi pemerintah daerah Kabupaten Bombana kurang maksimal. Terdapat 35 (tiga puluh lima) tanggapan netral untuk pernyataan pada semua indikator budaya organisasi. Tanggapan netral ini paling dominan adalah pada indikator budaya suportif. Artinya, sebagian pegawai di pemerintah Kabupaten Bombana masih ragu untuk saling terbuka di dalam lingkungan kerjanya, sehingga rasa kekeluargaan satu sama lain kurang terjalin erat.

Temuan ini sesuai dengan Teori Wallach (1983) yang membagi budaya organisasi kedalam 3 (tiga) tipe, yaitu budaya birokrasi, budaya inovatif dan budaya suportif. Sebagian besar pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana cenderung berorientasi pada tipe budaya birokrasi, yang berarti bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana selalu teratur dan sistematis, berlandaskan kekuasaan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Damayanti (2015) menemukan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Heptariani (2012) dan Nurviasari (2016) menemukan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana

Hasil pengujian hipotesis 2 (H2) menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan persepsi responden mengenai sistem pengendalian intern sudah sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sistem pengendalian intern telah dijalankan dengan baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan meningkat.

Sistem pengendalian intern pada pemerintah Kabupaten Bombana sudah sangat baik yang terbentuk dari lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya anggaran dapat disusun dengan jelas apabila pengendalian intern yang diperlukan memadai. Pengendalian intern yang diterapkan bukanlah maksud untuk menghilangkan semua kemungkinan kesalahan atau penyimpangan, akan tetapi pengendalian intern yang efektif akan menekan terjadinya kesalahan dan penyelewengan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Dengan adanya pengendalian intern didalam suatu pemerintahan, maka akan mampu menciptakan keseluruhan proses kegiatan yang baik, sehingga akan memberikan keyakinan yang memadai untuk melindungi

kekayaan pemerintah dengan cara meminimalisasi penyimpangan dan pemborosan serta memaksimalkan efisiensi dan efektifitas kinerja instansi pemerintah dan tentu saja akan memberikan dampak positif bagi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penilaian risiko merupakan indikator yang paling dominan dari sistem pengendalian intern, artinya pimpinan SKPD Kabupaten Bombana telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap system akuntansi. Lebih lanjut, Pimpinan SKPD selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Hal inilah yang paling berperan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana.

Temuan penelitian ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian Kaltsum (2013), Sari (2015), dan Afrina (2015) yang membuktikan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) yang menemukan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja..

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana

Hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana diterima. Hal ini menunjukkan bahwa apabila sistem akuntansi keuangan daerah yang diterapkan pada pemerintah Kabupaten Bombana semakin baik maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Bombana akan semakin meningkat.

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan persepsi responden terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sudah sangat baik dengan skor 81,97%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah pemerintah Kabupaten Bombana sudah sangat baik yang terbentuk dari pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran, serta pelaporan. Pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana telah memahami penjurnalan. Selain itu, mereka juga telah memahami cara memposting ke buku besar sesuai dengan nomor perkiraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta mereka telah mampu menyusun laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Tujuan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah adalah untuk mewujudkan fungsi analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah yang laporan keuangan itu pada akhirnya dapat menjadi suatu informasi untuk mengukur dan menilai kinerja pemerintah dalam rangka menggambarkan keberhasilan maupun kegagalan kerjanya. Jadi, dengan adanya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dapat membantu pemerintahan dalam mewujudkan akuntabilitas kerjanya. Indikator yang paling dominan membentuk variabel sistem akuntansi keuangan daerah adalah pencatatan. Artinya pegawai pada pemerintah Kabupaten Bombana telah mampu melakukan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*. Lebih lanjut, pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas pemerintah Kabupaten Bombana dilakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan *accrual basis*.

Temuan ini sesuai dengan Pemendagri No.64 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan komputer. Hasil penelitian ini mengkonfirmasi penelitian yang dilakukan oleh Afrina (2015) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hasil penelitian ini tidak mengkonfirmasi penelitian Anwar (2017) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kabupaten Bombana

Hasil uji hipotesis budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. diterima. Hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan variabel penjelas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah.

Budaya organisasi sangat penting didalam penerapan sistem pengendalian intern yang merupakan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik. Akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik tersebut harus didukung dengan sistem akuntansi keuangan daerah yang sistematis. Jika rangkaian prosedur akuntansi tersistematis maka akan sangat berpengaruh dalam mewujudkan tingkat pencapaian kinerja/pertanggungjawaban kinerja suatu instansi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1) Budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Hal ini disebabkan karena yang seharusnya menjadi perhatian bagi pejabat di lingkup Kabupaten Bombana belum dilakukan secara maksimal yaitu indikator budaya birokrasi. (2) Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan secara terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Hal ini disebabkan karena rata-rata indikator yang membentuk sistem pengendalian intern telah dilakukan dengan baik. (3) Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Hal ini disebabkan karena rata-rata indikator yang membentuk sistem akuntansi keuangan daerah telah dilakukan dengan baik. (4) Budaya organisasi, sistem pengendalian intern, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Bombana. Adapun saran penelitian adalah sebagai berikut. (1) Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan untuk meningkatkan budaya organisasi secara rutin dengan mengadakan kegiatan pendidikan, pelatihan dan diklat-diklat yang berkaitan dengan kinerja karyawan dalam bertindak laku guna meningkatkan pencapaian kinerja Kabupaten Bombana. (2) Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan untuk lebih mempertahankan dan

meningkatkan pengetahuan pegawai dan pejabat-pejabat di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Bombana tentang sistem akuntansi keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah melalui pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar, sehingga dapat menyusun dan memahami laporan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Bombana. (3) Pemerintah Kabupaten Bombana diharapkan untuk meningkatkan sistem pengendalian intern yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk mengarahkan, mengawasi serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan. (4) Untuk peneliti yang tertarik dengan tema yang sama bisa dikembangkan dengan menambah jumlah data yang diteliti dan memperluas objek penelitian misalnya ruang lingkup Provinsi sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal dan lebih dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai variabel independen yang digunakan terhadap instansi pemerintah lainnya secara menyeluruh. (5) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan peneliti untuk mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah seperti: disiplin kerja, hubungan institusi, pemahaman akuntansi, motivasi, evaluasi anggaran, kesulitan menentukan ukuran kinerja, otorisasi pengambilan keputusan dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Dina. 2015. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pengendalian Intern dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Studi Persepsian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pekanbaru)*. Vol. 2 No. 2.
- Anwar, Dewi Pratiwi. 2017. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemahaman Akuntansi dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Pada SKPD Dinas Kabupaten Biak Numfor, Papua)*. Abstrak. Telkom university.
- Attwood, T. 1990. *Corporate Culture: For or Against You?* Management Accounting, p. 26-29.
- Damayanti, Ni Luh Putu Asri. 2015. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Akuntabilitas Keuangan, Budaya Organisasi dan Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah (Studi Empiris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng)*. Undiksha.
- Dewi, Kadek Fitria. 2017. *Pengaruh Budaya Organisasi, Pengendalian Internal dan Kejelasan Sasaran Anggaran Pada Akuntabilitas Kinerja SKPD Kabupaten Gianyar Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi*. Jurnal Buletin Studi Ekonomi Vol. 22, No. 1.
- Donaldson, Lex, Davis James H. 1991. *Stewardship Theory or Agency Theory :CEO Governance and Shareholders Return*. Australian Journal of Management. Vol.16 iss. 1.
- Effendi, Sofian. 2005. *Membangun Budaya Birokrasi Untuk Good Governance*. Makalah Seminar Lokakarya Nasional Reformasi Birokrasi Diselenggarakan Kantor Menteri Negara PAN 22 September 2005.
- Gao. 2005. *Performance Measurement and Evaluation: Definitions and Relationships*. MD: General Accounting Office. Gaithersburg. GAO-05739SP.
- Governmental Accounting Standards Board. 1987. *Concepts Statement No. 1. Objectives of Financial Reporting*.

- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit-UNDIP. Semarang.
- Hidayatullah, Afilu. 2015. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja SKPD Di Merauke*. Kajian Multi Disiplin Ilmu untuk Mewujudkan Poros Maritim dalam Pembangunan Ekonomi Berbasis Kesejahteraan Rakyat ISBN: 978-979-3649-81-8.
- Heptariani, Susi. 2012. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau)*. Jurnal SOROT Vol 8 No 1 April hal 1 – 104.
- Ihyaul Ulum, MD. 2004. *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- James M. Reeve dkk. (2010). *Pengantar Akuntansi-Adaptasi Indonesia (Principles of Accounting-Indonesia Adaptation)*. Penerjemah Damayanti Dian. Buku 1 dan 2. Jakarta: PT. Salemba Empat.
- Kaltsum, Ummu. 2013. *Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Salatiga)*. Diponegoro Journal Of Accounting Halaman 1-14. ISSN (Online): 2337-3806.
- Kreitner, Robert and Angelo Kinicki. 2001. *Organizational Behavior*. Fifth Edition. Irwin McGraw-Hill.
- Lembaga Administrasi Negara. 2003. *Penyusunan Standar Pelayanan Publik*. LAN. Jakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nurkhamid, Muh. 2008. *Implementasi Inovasi Sistem Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Akuntansi Pemerintah, Vol. 3, No. 1, 45-76.
- Nurviasari, Rizki. 2016. *Pengaruh Sistem Informasi, Komitmen Manajemen, Budaya Organisasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 5, Nomor 4 ISSN : 2460-0585.
- Pasoloran, Oktavianus dan Firdaus Abdul Rahman. 2001. *Teori Stewardship: Tujuan Konsep dan Implikasinya pada Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik*. Jurnal Bisnis dan Akuntansi vol.3, No.2.
- Putri, Egrinaen Mauliziska Nugraheni. 2015. *Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) (Empirical Study On the regional work units Pekanbaru)*. JOM Fekon Vol. 2 No. 2.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 *Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 *Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 *tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 *tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.*
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.*
- Rasul, Syahrudin, 2003. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara.* Jakarta: PNRI.
- Riantiarno, Reynaldi. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu).* Pekbis Jurnal, Vol.3, No.3: 560-568.
- Republik Indonesia. 2016. *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.* Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
- Republik Indonesia. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.*
- Robbins, Stephen P. (2006). *Perilaku Organisasi.* Edisi kesepuluh. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia.
- Rofika. 2014. *Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketaatan Terhadap Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.* Jurnal Akuntansi, Vol. 2, No. 2: 197-209 ISSN 2337-4314.
- Romney, Marshal B dan Steinbart, Paul John. 2009. *Accounting Information Systems.* USA: Cengage Learning.
- Sari, Eka Kartika. 2015. *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntailitas Kinerja.* Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 4 No.9.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D).* Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono. (2005). *Teori Akuntansi.* Edisi Ketiga. BPFE. Yogyakarta.
- Schein, Edgar H. 1992. *Organizational Culture and Leadership.* Jossey Bass. San Francisco.
- Syahrir, Muhammad.2018. *Pengaruh Budaya Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Bombana.* Program Pascasarjana Proqram Studi Ilmu Ekonomi, Universitas Halu Oleo.
- The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission.* 1992. *Internal Control Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organization of the treadway Commission.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.*
- Wallach, Ellen J. 1983. *Individuals and Organizations: The Cultural Match.* *Training and Development Journal*, pp. 29-36.